

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pendidikan adalah untuk semua, konsep pendidikan untuk semua berarti mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu mendapat layanan pendidikan. Layanan pendidikan meliputi layanan pemerintah (pusat, kabupaten/kota dan dinas pendidikan) kepada masyarakat dan sekolah, layanan sekolah kepada masyarakat dan peserta didik dan layanan guru kepada peserta didik. Hak memperoleh layanan pendidikan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu tiap warga negara Indonesia berhak atas pengajaran.

Hak memperoleh pendidikan juga tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat 1 yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Karena mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan maka prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka pemerataan akses dan kesempatan pendidikan Pemerintah mengeluarkan program wajib belajar. Dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas

tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program wajib belajar masih ditemui kendala yaitu ada peserta didik putus sekolah atau rentan putus sekolah. Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya kurang mampu sehingga orangtua tidak mampu membiayai pendidikan; yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; dan yang dengan keinginan sendiri tidak mau sekolah. Bila ditinjau dari sudut biaya, sebenarnya ada program sekolah gratis untuk pendidikan dasar. Sekolah gratis tersebut belum mampu menyelesaikan kasus putus sekolah atau rentan putus sekolah. Biaya masih menjadi alasan orangtua tidak menyekolahkan anaknya. Biaya yang ditanggung orangtua bukan sekedar biaya iuran sekolah, seragam, buku dan alat tulis melainkan biaya uang saku, transportasi dan lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah (*drop out*).

Kota Probolinggo merupakan kota pelajar yang menyediakan fasilitas pendidikan untuk masyarakat mulai pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Probolinggo mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, setiap anak usia sekolah di kota Probolinggo setidaknya mampu menempuh pendidikan minimal sampai pendidikan menengah atas. Program wajib belajar 12 tahun ini juga masih menemui kendala yaitu adanya kasus putus sekolah atau rentan putus sekolah. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2022, jumlah peserta didik yang putus sekolah jenjang SD di Kota Probolinggo sebanyak 10 peserta didik.

Untuk jenjang sekolah yang berada di bawah naungan non Dinas Pendidikan jumlah peserta didik yang putus sekolah untuk jenjang SD-MI di Kota Probolinggo terdapat 2 peserta didik,

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kota Probolinggo masih ada sesuai data. Hal ini masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menekan angka *drop out*.

Salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia Pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan sekolah dasar rintisan wajib belajar 12 tahun. PIP menjangkau peserta didik dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan). (Diunduh dari: <http://dindik.babelprov.go.id/> pada 1 April 2023).

Salah satu Sekolah Dasar di Kota Probolinggo yang melaksanakan PIP melalui KIP adalah SD N Sukabumi 1. Peserta didik yang memperoleh PIP melalui KIP pada tahap 1 dan 2 sebanyak 9 peserta didik, untuk tahap 4

dan 5 sebanyak 4 peserta didik. Jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP tidaklah sama dengan jumlah yang diusulkan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang terbatas tetapi jumlah penerima banyak sehingga belum tentu yang diusulkan memperoleh PIP.

Penelitian ini penting dilaksanakan dikarenakan Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa yang mendukung pendidikan menengah universal atau pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dan sekolah mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mengontrol implementasi Program Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian dilaksanakan di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo dengan pertimbangan banyaknya peserta didik yang memperoleh beasiswa dan rekomendasi dari pengelola PIP di Dinas Pendidikan. Dari permasalahan di atas peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui tentang :

1. Bagaimana implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan yang positif bagi pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat.
 - b. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian lanjut terkait dengan implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo.
2. Secara Praktis
 - a. *Bagi Mahasiswa*, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai manajemen sarana prasarana pada sebuah lembaga khususnya lembaga pendidikan.

- b. *Bagi Peneliti*, yang juga sekaligus sebagai pelaksana manajemen dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien.
- c. *Bagi Pemerintah*, berkaitan dengan implemementasi suatu perda, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sebuah aplikasi, dan mempermudah temuan-temuan lebih awal sebelum melaksanakan monitoring ke lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami skripsi ini, maka skripsi ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab pembahasan dan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai uraian secara umum mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka dasar teoritik, dan kerangka pemikiran sebagai jawaban sementara dari penelitian ini tentang implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian tentang implementasi program Indonesia pintar di SDN Sukabumi 1 Kota Probolinggo.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang data-data atau sebuah informasi dari Dinas terkait yang diambil dan selanjutnya digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada, serta untuk pengolahan data.

5. Bab V Penutup

Bab V kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang memuat kesimpulan terkait implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo. Adapun saran berisi hal-hal di luar penelitian yang di temukan selama penelitian di lakukan saran-saran dapat berfungsi sebagai rujukan sekaligus rekomendasi terkait subyek penelitian.